

Implementasi Program Kebijakan Sekolah, Madrasah Dalam Peningkatan Mutu Standar Pengelolaan

Ermawati^{1✉}, Siti Aisyah², Jamrizal³, Ansori⁴

Manajemen Pendidikan Islam, Institut Agama Islam Nusantara Batang Hari, Indonesia
irmadamiri2271@gmail.com

Abstrak

Riset ini membahas dunia pendidikan beserta hal yang mendasarinya, terutama bagaimana menerapkan peraturan tentang standar pengelolaan sehingga mutu pendidikan meningkat, terutama di satuan pendidikan dan madrasah. Pendidikan saat ini memiliki masalah yang cukup kompleks. Tatanan dunia saat ini adalah sumber masalah yang sering timbul ini. Pada saat ini Semua lapisan masyarakat harus memahami perkembangan pesat ilmu dan teknologi dan beradaptasi dengan modernisasi. Standar pengelolaan pendidikan adalah kegiatan yang membahas tahapan awal, pengontrolan dan tindak lanjut kegiatan pendidikan di tingkat kabupaten/kota, provinsi, hingga nasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan, yang berarti serangkaian tindakan seperti membaca, mencatat, dan mengolah subjek penelitian. Peneliti mengumpulkan dan menyatukan data untuk mendapatkan informasi tentang topik yang mereka pelajari dengan menggunakan alat literasi digital seperti Google Scholar. Kualitas pendidikan yang tinggi yang didasarkan pada kebutuhan akan menghasilkan harapan pengguna yang dipenuhi dan hasil yang diinginkan pelanggan. Program kebijakan ini diharapkan dapat mewujudkan pendidikan berkualitas dan mempersiapkan generasi muda Indonesia yang unggul dalam menghadapi berbagai tantangan di masa depan.

Kata kunci: *Implementasi, Kebijakan, Standar Pengelolaan*

Abstract

This research discusses the world of education and the things that underlie it, especially how to implement regulations regarding management standards so that the quality of education increases, especially in education units and madrasahs. Education today has quite complex problems. The current world order is the source of these frequent problems. At this time, all levels of society must understand the rapid development of science and technology and adapt to modernization. Education management standards discuss the initial stages, control, and follow-up of educational activities at the district/city, provincial, and national levels. This research uses a library study approach, a series of actions such as reading, taking notes, and processing the research subject. Researchers collect and synthesize data to gain information about their study topics using digital literacy tools such as Google Scholar. High-quality education based on needs will result in user expectations being met and customer outcomes desired. It is hoped that this policy program can realize quality education and prepare Indonesia's young generation to excel in facing various challenges in the future.

Keywords: Implementation, Policy, Management Standards

PENDAHULUAN

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2010 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan Peraturan Menteri Agama (Permenag) Nomor 42 Tahun 2018 tentang Standar Pendidikan Agama Islam dan Madrasah adalah contoh dari peraturan turunan dari Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), menitikberatkan upaya meningkatkan kualitas standar pengelolaan sekolah/madrasah. Hal ini sejalan dengan Visi Misi Kementerian Agama Republik Indonesia untuk mewujudkan madrasah yang bermutu.

Amanat ini bertujuan untuk bagaimana mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan dapat mencerdaskan kehidupan bangsa yang tentunya akan memberikan dampak peningkatan kemampuan bersaing di kancah internasional dalam menghadapi tantangan abad 21. Meningkatkan mutu standar pengelolaan sekolah/madrasah merupakan hal yang esensial untuk mencapai tujuan pendidikan yang berkualitas. Hal ini didasari oleh beberapa latar belakang penting, antara lain: tuntutan Peningkatan Mutu Pendidikan, Gap antara Kualitas dan Standar, kebutuhan akan pengelolaan yang efektif dan efisien, tantangan dan persaingan Global

Implementasi program kebijakan sekolah/madrasah dalam peningkatan mutu standar pengelolaan merupakan langkah strategis untuk mewujudkan sekolah dan madrasah yang berkualitas, berdaya saing dan berwawasan Islami. Dengan memahami latar belakang yang mendasarinya, diharapkan program kebijakan tersebut dapat diimplementasikan dengan baik terhadap apa yang diharapkan.

Pancasila, UUD Negara RI Tahun 1945 dan UU Nomor 20 Tahun 2003, adalah pondasi utama pendidikan nasional. Pendidikan nasional bertanggung jawab untuk membangun karakter dan peradaban bangsa serta menumbuhkan keahlian siswa. Tujuan pendidikan nasional adalah untuk mendidik siswa menjadi beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME, memiliki akhlak terpuji, sehat, kreatif, dan mandiri (Berbagai & Satuan, 2013). Standar nasional menetapkan aturan untuk manajemen dan pelaksanaan pendidikan. Ini dilakukan untuk mencapai tujuan pendidikan berkualitas tinggi, yang merupakan tujuan nasional Indonesia. Selain itu, tujuan dari mewujudkan siswa yang cerdas, berbudi luhur, dan beradaptasi dengan perkembangan zaman adalah tujuan dari delapan standar pendidikan. Skema ini mencakup peraturan yang berkaitan dengan persiapan atau perencanaan, implemmentasi, dan monitoring kegiatan pendidikan di lembaga pendidikan tingkat daerah hingga nasional.

Berdasarkan informasi tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa pengelolaan dan pelaksanaan pendidikan harus dilakukan sejalan dengan peraturan yang ada dan tidak boleh keluar dari hal tersebut. Pengelolaan pendidikan yang baik memastikan bahwa tujuan pendidikan tidak dapat dicapai. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, institusi pendidikan harus membuat rencana pengelolaan. Pengelolaan pendidikan bermanfaat untuk membantu institusi pendidikan menilai, menyelidiki, dan mengubah tanggung jawab yang diperlukan. Dalam hal lain, untuk menghasilkan penduduk bangsa yang berpendidikan. Kepala sekolah memiliki tanggung jawab untuk mendorong setiap anggota sekolah atau madrasah memberikan kinerja terbaiknya. Kepala sekolah, sebagai atasan, bertanggungjawab atas komitmen untuk terus berinovasi dalam pengelolaan sekolah atau madrasah. Manajer sekolah dan madrasah harus memiliki kemampuan untuk merancang struktur organisasi dan menciptakan budaya organisasi.

Pendidikan saat ini memiliki masalah yang cukup kompleks. Tatanan dunia saat ini adalah sumber masalah yang sering timbul ini. Pada saat ini Semua lapisan masyarakat harus memahami perkembangan pesat ilmu dan teknologi dan beradaptasi dengan modernisasi. Fakta lapangan saat ini, tidak sedikit sekolah/madrasah yang belum memenuhi standar pengelolaan yang ditetapkan. Hal ini mengakibatkan beberapa permasalahan, seperti rendahnya mutu pembelajaran dan kurangnya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan sekolah/madrasah dan lemahnya sistem monitoring dan evaluasi dan kurangnya motivasi dan kompetensi guru dan staf di sekolah atau madrasah. Pengelolaan sekolah dan madrasah yang baik diperlukan untuk mencapai visi dan misi sekolah atau madrasah. Implementasi program kebijakan yang tepat dapat membantu mewujudkan pengelolaan sekolah madrasah yang efektif dan efisien.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan, yang berarti serangkaian tindakan seperti membaca, mencatat, dan mengolah subjek penelitian (Zed, 2003). Studi kepustakaan juga dapat didefinisikan sebagai penelitian yang menyelidiki peristiwa dalam tulisan atau pembutan melalui analisis teks atau wacana (Hamzah, 2020:7). Peneliti mengumpulkan dan menyatukan data untuk mendapatkan informasi tentang topik yang mereka pelajari dengan menggunakan alat literasi digital seperti Google Scholar.

Library research adalah mengumpulkan data dari banyak sumber bacaan, seperti buku, jurnal, dan artikel. Peneliti memiliki akses langsung ke teks atau naskah studi kepustakaan, data kepustakaan tetap relevan dan dapat digunakan, dan biasanya dianggap sebagai data sekunder karena peneliti menggunakan sumber data alternatif daripada data asli yang ditemukan di lapangan (Zed, 2014).

Pembahasan

Format standar pengelolaan adalah referensi kerangka pendidikan universal yang berkaitan dengan rencana tindakan, persiapan, pengerjaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan baik di tingkat sekolah, kabupaten/kota, propinsi, atau nasional untuk meminimalkan dan mencapai tujuan pendidikan yang tepat sasaran (Refika, 2018). Standar pengelolaan pendidikan juga dikenal sebagai penerapan pendidikan. Sekolah dan Madrasah dapat menggunakan pengelolaan pendidikan sebagai dasar untuk mengukur, mengevaluasi, dan merevisi aktivitas yang dianggap penting. Selain itu, tujuan pengelolaan pendidikan adalah untuk mendukung proses pendidikan sehingga generasi berikutnya memiliki kualitas yang baik (Taopan, Oedjoe, & Sogen, 2019). Dengan data yang valid, mandiri, bekerja sama, adil, dan terbuka, pemberdayaan pendidikan di tingkat dasar dan menengah dilakukan dengan kontrol.

Griffin menyatakan, pengelolaan adalah upaya mewujudkan cita-cita organisasi dengan mengoptimalkan manfaat sumber daya organisasi dan meningkatkan kinerja tugas dan tanggung jawab setiap anggota. "Pengelolaan" adalah istilah yang digunakan dalam bidang manajemen, menurut Nugroho (2003:119). Kata dasar dari "pengelolaan" adalah "kelola", hal ini menunjukkan pada tahapan mengelola sesuatu dalam rangka mencapai tujuan, dengan kata lain pengelolaan adalah manajemen/pengaturan. Pendidikan berasal dari kata "perkembangan". Hal ini sesuai dengan pendapat Priatna (2004:27) bahwa pendidikan merupakan usaha untuk mengembangkan mutu diri manusia secara keseluruhan. Hidayat dan Machali (2012) menyatakan, pengelolaan pendidikan merupakan tahapan kolaborasi untuk mencapai tujuan pendidikan dengan mengoptimalkan segala kemampuan dan sumber daya yang ada. Selain itu, mereka memberikan berbagai cara untuk mencapai tujuan dimaksud.

Penyusunan rencana tindakan, rencana proses, pemantauan dan evaluasi, dan rencana pengendalian informasi adalah bagian penting dari pemberdayaan sekolah dan Madrasah. Tampuk lembaga pendidikan mempertimbangkan visi, misi, tujuan, dan persiapan program. Program kerja sekolah dan madrasah dilaksanakan melalui pembagian tugas dan wewenang dengan mengacu pada tata kelola yang ditulis tentang kesiswaan, pembelajaran, tenaga kependidikan, fasilitas, dan keuangan. Selain itu, kegiatan pendidikan harus mempertimbangkan nilai-nilai budaya, batasan institusi pendidikan, dan keterlibatan masyarakat dan non-sekolah.

Kerangka Standar Pengelolaan Pendidikan terdiri dari tiga pilar: pengaturan lembaga pendidikan, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat. Permen Pendidikan mengatur standar pengelolaan. Menurut Arip Mahpudin (2015), Permen No. 19 Tahun 2007 menetapkan standar untuk bagaimana gugus tugas pendidikan awal dan menengah menerapkan pendidikan. Artikel 49 menetapkan penerapan kurikulum di sekolah dasar dan menengah. Ini akan diterapkan pada kurikulum sekolah yang digambarkan sebagai mandiri, kooperatif, adil, terbuka, dan dapat diandalkan.

Melengkapi standar pelayanan minimal pendidikan (SPM) dan mendekatkan pendidikan dengan harapan publik. Pengelolaan sekolah harus mematuhi peraturan, termasuk manajemen sistem informasi, pengawasan dan evaluasi kepemimpinan sekolah dan madrasah, dan perencanaan program dan pelaksanaan rencana kerja. Untuk mencapai peningkatan kualitas pendidikan, semua pihak harus terlibat dalam penerapan standarisasi pendidikan. Kepala sekolah memiliki peran penting dalam mendorong warga sekolah untuk berpartisipasi dalam proses ini dan berkomitmen terhadap apa yang dilakukan untuk membawa perubahan dan inovasi dalam pendidikan. Sebagai pemimpin sekolah, kepala sekolah harus memiliki kemampuan untuk merencanakan struktur organisasi dan membentuk budaya sekolah sehingga sekolah dapat berkembang dan siap menghadapi ancaman (Mutia, 2019).

Batasan pendidikan adalah cara mencari pembinaan. Kemampuan harus dipelajari dan dipertahankan secara teratur dan berkelanjutan untuk mencapai tujuan pendidikan. Teori pengelolaan pendidikan yang baik dapat digunakan untuk mencapai kualitas pendidikan yang tinggi, di mana kualitas yang menjadi acuan kebutuhan memenuhi harapan pelanggan dan menghasilkan hasil yang diharapkan. Sebuah institusi pendidikan atau lembaga pendidikan dapat diuji kelayakannya dengan menyediakan fasilitas pendukung, mempekerjakan karyawan yang berpengalaman, dan menciptakan lingkungan budaya. Faktanya, ada sejumlah kendala utama dalam menerapkan standar pengelolaan pendidikan di lapangan.

Pertama, staf pengelola pendidikan tidak memahami standar. Ini menyebabkan masalah dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program sekolah sesuai dengan standar. Kedua, jika sekolah memiliki anggaran terbatas, akan sulit untuk memenuhi persyaratan sarana prasarana dan mengelola sumber daya secara efektif. Untuk mengatasi masalah ini, masyarakat dan regulator harus membantu. Ketiga, mengukur capaian standar, melakukan perbaikan berkelanjutan, dan menemukan penyimpangan menjadi sulit karena kurangnya pengawasan dan evaluasi kinerja. Keempat, pencapaian standar proses dan kompetensi lulusan menjadi sulit karena kualitas guru yang rendah. Kesejahteraan dan kemampuan guru harus ditingkatkan. Kelima, guru harus mengembangkan metode pembelajaran mereka. Metode pembelajaran monoton menghambat pencapaian standar dan bertentangan dengan protokol.

Faktor internal, seperti kurangnya motivasi, dan faktor eksternal, seperti kurangnya dukungan orang tua dan fasilitas pendidikan, adalah enam penyebab rendahnya literasi siswa. Salah satu komponen dari rencana penerapan standar pengelolaan pendidikan adalah pengawasan dan pemeriksaan ulang proses yang sudah terjadi di tempat kerja. Pemimpin lembaga pendidikan memiliki tanggung jawab dan tanggung jawab yang harus dipenuhi dalam hal pengawasan dan penyelidikan ulang. Pemimpin harus melakukan pemantauan dan kajian ulang sesuai dengan rencana tindakan saat ini. "Setiap satuan pendidikan wajib memenuhi standar pengelolaan pendidikan yang berlaku secara nasional" (UU RI Nomor 19 Tahun 2005).

Dalam lampiran Permendiknas 19/2007 terdapat penjelasan tentang hal-hal berikut yang berkaitan dengan standar pengelolaan nasional: a) Pembuatan rencana Tindakan, b) Pengawasan dan evaluasi, c) Manajemen institusi Pendidikan, d) Sistem informasi manajemen, dan e) Pengadaan khusus.

Di era globalisasi, sekolah/madrasah dihadapkan pada tantangan persaingan global dalam menghasilkan lulusan yang berkualitas. Peningkatan mutu standar pengelolaan menjadi salah satu kunci untuk meningkatkan daya saing sekolah dan madrasah. Masyarakat memiliki hak untuk mengetahui dan menilai kinerja sekolah dan madrasah. Implementasi program kebijakan yang transparan dan akuntabel dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap madrasah.

Peningkatan mutu standar pengelolaan sekolah dan madrasah membutuhkan kerjasama dan partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan, seperti pemerintah, sekolah madrasah, guru, orang tua siswa, dan masyarakat. Implementasi program kebijakan dapat menjadi wadah untuk memperkuat kerjasama antar pemangku kepentingan. Perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program pendidikan di tingkat satuan pendidikan, seperti kota, provinsi, atau nasional, berhubungan langsung dengan Standar Nasional Pendidikan. Tujuan pendidikan Islam adalah untuk menghasilkan orang yang beriman dan bertaqwa serta orang yang saleh dan adil. Sekolah dasar dan menengah, menurut PP RI No. 19 Tahun 2005 tentang SNP, harus membuat kurikulum mereka dengan mempertimbangkan Standar Isi, Standar Kompetensi Lulusan, Standar Pengelolaan Pendidikan, Standar Proses, dan Standar Penilaian. Mereka juga harus mengikuti pedoman yang dibuat oleh Badan Standar Nasional Pendidikan. Seluruh fungsi manajemen yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan, seperti perencanaan, organisasi, penggerak, dan pengendalian, harus dilaksanakan untuk pengelolaan (Nanang Fatah, 2004:1). Pembuatan keputusan, proses pengembangan, dan pemilihan kegiatan untuk memecahkan masalah tertentu adalah semua aspek perencanaan yang baik (Nanang Fatah, 2004:49).

Proses pengambilan keputusan didasarkan pada Standar Nasional Pendidikan, yang merupakan standar terendah untuk skema pendidikan di Indonesia. Meningkatkan mutu standar pengelolaan sekolah/madrasah merupakan langkah krusial dalam mewujudkan pendidikan berkualitas. Implementasi program kebijakan yang efektif menjadi kunci utama dalam mencapai

tujuan tersebut. Berikut ini adalah pembahasan mengenai implementasi program kebijakan sekolah/madrasah dalam peningkatan mutu standar pengelolaan ditinjau dari teori dan regulasi yang ada:

Berbagai teori manajemen pendidikan dapat dijadikan landasan untuk memahami dan merumuskan program kebijakan sekolah/madrasah yang efektif. Beberapa teori yang relevan antara lain: 1) Teori Manajemen Berbasis Sekolah (MBS): MBS menekankan otonomi dan akuntabilitas sekolah dalam mengelola sumber daya dan program pendidikannya. Hal ini sejalan dengan implementasi program kebijakan yang harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi madrasah. 2) Teori Sistem: Sekolah/madrasah dipandang sebagai sebuah sistem yang terdiri dari berbagai komponen yang saling terkait. Implementasi program kebijakan harus mempertimbangkan interaksi antar komponen tersebut agar tercipta sinergi dan efektivitas. 3) Teori kepemimpinan: Kepemimpinan yang efektif dari kepala madrasah dan tim manajemen sangat penting dalam mendorong implementasi program kebijakan yang sukses. 4) Teori motivasi: Guru dan staf madrasah perlu dimotivasi untuk terlibat aktif dalam implementasi program kebijakan. Motivasi dapat ditingkatkan melalui berbagai cara, seperti penghargaan, pelatihan, dan pengembangan karir.

Di Indonesia, terdapat beberapa regulasi yang mengatur tentang standar pengelolaan sekolah/madrasah, antara lain: UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas: Undang-undang ini mengatur tentang standar nasional pendidikan, termasuk standar pengelolaan sekolah/madrasah, PP No. 17 Tahun 2010 tentang SNP: Peraturan Pemerintah ini memuat secara detail tentang standar pengelolaan sekolah/madrasah, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi, dan Permenag No. 42 Tahun 2018 tentang Standar Pendidikan Agama Islam dan Madrasah: Peraturan Menteri Agama ini mengatur secara khusus tentang standar pengelolaan madrasah, yang selaras dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010.

Berdasarkan teori dan regulasi yang ada, implementasi program kebijakan sekolah/madrasah dalam peningkatan mutu standar pengelolaan dapat dilakukan melalui beberapa langkah berikut: 1) Penyusunan Program Kebijakan: Program kebijakan harus disusun berdasarkan analisis kebutuhan madrasah, visi, misi, dan tujuan madrasah, serta selaras dengan standar pengelolaan yang telah ditetapkan. 2) Sosialisasi Program Kebijakan: Program kebijakan harus disosialisasikan kepada seluruh pemangku kepentingan madrasah baik pihak internal maupun eksternal. 3) Pelatihan dan Pengembangan Kapasitas: Pemangku kepentingan madrasah perlu dilatih dan dikembangkan kapasitasnya untuk melaksanakan program kebijakan secara efektif. 4) Monitoring dan Evaluasi: Pelaksanaan program kebijakan harus dimonitor dan dievaluasi secara rutin untuk memastikan tujuan dapat dicapai, 5) Pengembangan Budaya Mutu: Budaya mutu perlu dikembangkan di madrasah untuk mendorong komitmen dan partisipasi semua pihak dalam meningkatkan mutu standar pengelolaan madrasah.

Persoalan dan Solusi

Implementasi program kebijakan sekolah/madrasah dalam peningkatan mutu standar pengelolaan menghadapi beberapa tantangan, antara lain: 1) Keterbatasan sumber daya: Keterbatasan sumber daya, seperti dana, sarana prasarana, dan tenaga kependidikan, dapat menghambat implementasi program kebijakan. 2) Kurangnya komitmen dan partisipasi: Kurangnya komitmen dan partisipasi dari pemangku kepentingan madrasah dapat menghambat efektivitas program kebijakan. 3) Lemahnya budaya mutu: Lemahnya budaya mutu di madrasah dapat menghambat pencapaian tujuan program kebijakan.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, diperlukan beberapa solusi, antara lain: a) Peningkatan pendanaan pendidikan: Pemerintah perlu meningkatkan pendanaan pendidikan untuk mendukung pelaksanaan program kebijakan di sekolah/madrasah, b) Pengembangan kompetensi SDM: Pemangku kepentingan madrasah perlu dikembangkan kompetensinya melalui pelatihan dan pengembangan karir, c) Penanaman budaya mutu: Budaya mutu perlu ditanamkan di madrasah melalui berbagai program dan kegiatan.

KESIMPULAN

Implementasi program kebijakan sekolah/madrasah dalam peningkatan mutu standar pengelolaan didasari oleh berbagai latar belakang penting, seperti mandat peraturan perundang-undangan, tantangan peningkatan mutu pendidikan, kebutuhan akan lulusan yang berkualitas,

peningkatan daya saing bangsa, mewujudkan masyarakat yang beradab, memperkuat peran sekolah dan madrasah dalam pendidikan nasional, dan beberapa faktor, Program kebijakan ini diharapkan dapat mewujudkan pendidikan berkualitas dan mempersiapkan generasi muda Indonesia yang unggul dalam menghadapi berbagai tantangan di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anjarsari, P. (2020). Strategi Implementasi Kebijakan Standar Pengelolaan. Malang: Intelegensia Media.
- Arip Mahpudin. (2015). Standar_Pengelolaan_Pada_Standar_Nasio na (1). Badan, A., Nasional, S., & Selatan, C. J. (2012). Badan Standar Nasional Pendidikan Daftar Isi.
- Arip Mahpudin. (2015). Standar_Pengelolaan_Pada_Standar_Nasio na (1). Badan, A., Nasional, S., & Selatan, C. J. (2012).
- Berbagai, P., & Satuan, J. (2013). Pemetaan Keterpenuhan Standar Nasional Pendidikan Pada Berbagai Jenjang Satuan Pendidikan
- Berbagai, P., & Satuan, J. (2013). Pemetaan Keterpenuhan Standar Nasional Pendidikan Pada Berbagai Jenjang Satuan Pendidikan
- Depdiknas. (2003). Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003. Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Feni Herlina, Sufyarman Marsyidin Ahmad Sabandi DOI: 10.31004/edukatif.v2i2.127 Edukatif : Jurnal Ilmu Pendidikan Vol 2 No 2 Tahun 2020 p-ISSN 2656-8063 e-ISSN 2656-8071
- Indonesia. (2012). Peraturan Pemerintah Republik, 'Standar Nasional Pendidikan', Rahman, Abdul, 'Pendidikan Agama Islam Dan Pendidikan Islam-Tinjauan Epistemologi Dan Isi-Materi', Jurnal Eksis, 8.1
- Kebijakan Standar Pengelolaan Di Sekolah Dasar Feni Herlina¹, Sufyarman Marsyidin², Ahmad Sabandi³ Universitas Negeri Padang, Sumatera Barat, Indonesia^{1,2,3} E-mail : feniherlina30@gmail.com¹ sufyarma1954@gmail.com² sabandi@fip.unp.ac.id³
- Mutia. (2019). Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pendidikan Di Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Bandar Lampung. Uin Raden Intan Lampung, 53(9), 1689–1699. <https://doi.org/10.1017/Cbo9781107415324.004>
- Rahayu, M. (2015). Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pendidikan Di Sekolah Dasar Kecamatan Ngemplak Kabupaten Sleman. Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan, 8(1), 62– 79. <https://doi.org/10.21831/Jpipfip.V8i1.4929>
- Refika, N. (2018). Implementasi Standar Pengelolaan Pendidikan Dalam Peningkatan Mutu Sekolah Di Smpn 4 Batusangkar. Implementasi Standar Pengelolaan Pendidikan Dalam Peningkatan Mutu Sekolah Di Smpn 4 Batusangkar.
- Standar Pengelolaan Pendidikan Dalam Mencapai Tujuan Pendidikan Islam Andi Warisno Institut Agama Islam An Nur Lampung (2021) Email: andiwarisno75@gmail.com An Nida Volume 1, Nomor 1, <https://journal.an-nur.ac.id/index.php/jp>